

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat menurun pada 2021. Pada dua tahun pertama, kinerja kemandirian masih rendah dengan pola hubungan konsultatif, menandakan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pada 2022 dan 2023, rasio ini meningkat hingga mencapai kategori kinerja sedang dengan pola hubungan partisipatif, seiring meningkatnya kontribusi PAD. Secara rata-rata, rasio kemandirian mencapai 51%, yang menunjukkan perbaikan kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Meski demikian, strategi peningkatan PAD tetap diperlukan agar kemandirian keuangan semakin membaik dan ketergantungan terhadap dana transfer berkurang.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori kinerja sangat tinggi. Secara rata-rata mencapai 65%, yang tergolong kinerja sangat tinggi. Artinya, lebih dari setengah pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman masih sangat besar, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah perlu ditingkatkan agar ketergantungan tersebut berkurang.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat derajat desentralisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori kinerja sedang dengan

rata-rata rasio sebesar 33%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, meskipun terjadi peningkatan pada 2022 dan 2023. Kondisi tersebut menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi belum optimal, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan PAD agar perannya dalam mendukung pendapatan semakin besar.

4. Rasio Efisiensi PAD

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori sangat efisien, dengan rata-rata rasio sebesar 4%. Biaya pemungutan PAD dihitung sebesar 5% dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga sebagian besar PAD yang terkumpul sebagian besar tersalurkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, karena biaya pemungutannya relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah dilakukan dengan baik dan efisien, sehingga PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan daerah tanpa membebani anggaran.

5. Rasio Efektivitas PAD

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori kinerja sangat efektif, dengan rata-rata rasio sebesar 107%. Setiap tahun realisasi PAD selalu melampaui target anggaran, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan dari sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berjalan baik dan pengelolaan PAD dilakukan dengan optimal, sehingga dapat membantu membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman secara berkelanjutan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan potensi pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan sah lainnya secara lebih efektif. Selain itu, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah juga perlu ditingkatkan agar peran keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi semakin besar. Pemerintah juga diharapkan dapat mempertahankan efisiensi pemungutan PAD agar biaya yang dikeluarkan tetap kecil, sehingga sebagian besar PAD dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, efektivitas PAD yang sudah sangat efektif perlu dipertahankan dengan terus mengoptimalkan penerimaan agar kinerja keuangan daerah tetap stabil dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat sebaiknya memberikan dukungan agar Kabupaten Sleman dapat lebih mandiri secara keuangan dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Dukungan ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang memberi peluang lebih besar bagi daerah untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah pusat juga dapat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam mengelola keuangan agar lebih profesional. Selain itu, pemerintah pusat dapat membantu pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung pemungutan PAD supaya lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemerintah pusat juga sebaiknya memberikan insentif kepada daerah yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD, sehingga mendorong daerah untuk terus memperkuat kemandirian keuangannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian sejenis, sebaiknya dapat memperluas periode penelitian sehingga hasil kinerja keuangan pemerintah daerah lebih mendalam. Peneliti juga dapat menambahkan beberapa rasio keuangan lainnya, seperti rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, metode analisis dapat dikombinasikan, misalnya dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa angka, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

5.3 PENGETAHUAN DAN WAWASAN YANG DIPEROLEH

Berdasarkan hasil kajian dan observasi yang telah dilakukan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru yang mendalam mengenai:

1. Analisis Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penulis memperoleh pemahaman mengenai struktur dan komponen utama dalam LRA, seperti pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah. Melalui kegiatan ini, penulis mengetahui bagaimana membandingkan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai oleh pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga memperoleh keterampilan dalam menginterpretasikan data keuangan secara sistematis dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan analisis kinerja keuangan melalui perhitungan berbagai rasio keuangan daerah.

2. Perhitungan Rasio Keuangan Daerah

Penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses perhitungan rasio keuangan daerah sebagai bagian dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio tersebut meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Efektivitas PAD. Melalui proses perhitungan tersebut, penulis menjadi lebih terampil dalam meningkatkan ketelitian serta

kemampuan analisis dalam mengevaluasi kondisi keuangan daerah berdasarkan data yang tersedia.

3. Penerapan Teori dalam Praktik

Melalui penyusunan Lpoaran Tugas Akhir ini, penulis memperoleh pengalaman secara langsung dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan praktikum SKPD. Penulis memahami bahwa konsep-konsep yang selama ini dipelajari secara teoritis di kelas dapat diterapkan secara nyata. Hal ini terlihat dari keterlibatan penulis dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, dan pelaporan keuangan, sehingga memperkuat pemahaman penulis terhadap proses administrasi keuangan di sektor publik.